

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disingkat dengan UMKM. Fakta bahwa UMKM sebagai fondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan begitu saja (Limanseto, 2021). Sebab, selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM juga berpotensi dalam meningkatkan penerimaan kas negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (KemenkopUKM) pada bulan Maret 2021, sekitar 64,2 juta pelaku UMKM berkontribusi sebesar 61,07 persen atau setara 8,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM sebesar 97 persen dari total keseluruhan tenaga kerja (Limanseto, 2021). Dari data tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor UMKM karena memiliki banyak pelaku usaha sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menargetkan pada akhir tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap ekspor dan PDB dapat meningkat (Nugraha, 2019). Namun, kepastian akan terealisasinya

target tersebut diragukan karena adanya pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara termasuk Indonesia dihebohkan dengan adanya virus jenis baru yang bernama Covid-19. Virus ini dapat menyerang siapa saja dan penularannya relatif cepat. Pada umumnya, orang yang terinfeksi akan mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, tingkat kematian di awal masa pandemi sangat tinggi sehingga pemerintah memberikan berbagai kebijakan mulai dari *social distancing*, *lockdown* hingga yang terbaru adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB untuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19. Namun, dengan adanya kebijakan baru tersebut, menyebabkan ruang gerak masyarakat terbatas dan semua aktivitas maupun pekerjaan hanya dapat dilakukan dari rumah.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada berbagai sektor terutama sektor perekonomian termasuk UMKM. Mayoritas UMKM merasakan dampak negatif dari kebijakan tersebut dan hanya sebagian kecil yang merasakan dampak positif dari adanya pandemi Covid-19. Soetjipto (2020) berpendapat bahwa omzet yang diperoleh pelaku UMKM selama masa pandemi mengalami penurunan karena ruang promosi dan penjualan terbatas akibat adanya kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah.

Sektor UMKM selaku pemegang peranan penting dalam penerimaan kas negara serta penyerapan tenaga kerja membuat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan usaha yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Untuk meminimalkan dampak tersebut, pemerintah melalui Kementerian

Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang memperoleh dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berguna untuk membantu meringankan beban wajib pajak UMKM apabila memenuhi batasan peredaran bruto tertentu dalam membayar pajak di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, tidak semua wajib pajak UMKM dapat memanfaatkannya karena insentif ini hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) atau Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang nilai peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Insentif yang diperoleh Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu dari pemerintah yaitu insentif Pajak Penghasilan final ditanggung pemerintah (DTP). Sehingga Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu tidak perlu menyetor pajak. Sementara itu, uang yang semula digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan menjadi modal untuk keberlangsungan usaha wajib pajak.

Pada kenyataannya pemanfaatan penggunaan insentif PPh final DTP tercatat baru sebesar 15 persen atau 9,8 juta dari total keseluruhan UMKM di Indonesia (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Arifani & Kusuma (2021) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan insentif pajak masih belum optimal. Seperti halnya pemanfaatan insentif PPh final DTP di Provinsi Bengkulu, berdasarkan data kajian

fiskal regional tahun 2020 diketahui baru 818 dari 7.861 Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang memanfaatkan insentif PPh final DTP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian atas efektivitas pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah di era pandemi Covid-19 bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Bengkulu Dua.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas pemanfaatan insentif PPh final DTP selama masa pandemi Covid-19 bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Bengkulu Dua?
- 2) Apa yang menjadi hambatan bagi KPP Pratama Bengkulu Dua dalam mengoptimalkan pemanfaatan insentif PPh final DTP?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkulu Dua dalam meningkatkan pemanfaatan insentif PPh final DTP bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu?
- 4) Bagaimana pandangan Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan adanya insentif PPh final DTP selama pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan insentif PPh final DTP selama masa pandemi Covid-19 bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu di KPP Pratama Bengkulu Dua.
- 2) Mengetahui hambatan bagi KPP Pratama Bengkulu Dua dalam mengoptimalkan pemanfaatan insentif PPh final DTP.
- 3) Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkulu Dua dalam meningkatkan pemanfaatan insentif PPh final DTP bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu.
- 4) Mengetahui pandangan Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan adanya insentif PPh final DTP selama pandemi Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini pada insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Peraturan mengenai insentif ini beberapa kali mengalami perubahan karena melihat situasi pandemi yang belum berakhir. Kebijakan mengenai Insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diatur dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK Nomor 149/PMK.03/2021.

Dari berbagai jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah. Penulis memfokuskan pembahasan pada insentif PPh final DTP bagi Wajib Pajak UMKM

yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian akan dilakukan di daerah domisili penulis, Kota Bengkulu, yakni di KPP Pratama Bengkulu Dua.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan bahwa Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai efektivitas pemanfaatan PPh final DTP bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu, hambatan apa saja yang dihadapi KPP Pratama Bengkulu Dua dalam mengoptimalkan pemanfaatan insentif tersebut serta upaya yang dilakukan KPP Pratama Bengkulu Dua dalam mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya yang membahas mengenai efektivitas insentif PPh final DTP bagi Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu juga dapat menjadikan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai referensi.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang yang membahas mengenai fakta dan permasalahan terkait dengan pembahasan di Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain latar belakang terdapat juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori, pendapat dan penelitian terdahulu terkait dengan insentif PPh final DTP untuk Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu.

Referensi yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ataupun literatur lain yang relevan dengan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi mengenai metode yang akan digunakan penulis untuk memperoleh data, gambaran umum KPP Pratama Bengkulu Dua, serta jawaban-jawaban yang ada di rumusan masalah yang ada di Bab Pendahuluan akan dijelaskan secara rinci di dalam Bab Pembahasan.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian akhir dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi kesimpulan dan saran oleh penulis atas hasil pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.